PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2021 | Hal.: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ketapang Raih WTP Tujuh Kali Beruntun

KETAPANG– Untuk ketujuh kalinya, Pemerintah Daerah Ketapang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Ketapang tahun anggaran 2020. Predikat opini WTP tersebut disampaikan oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Jumat (7/5).

Penyerahan LHP LKPD tahun anggaran 2020 dilakukan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan dihadiri Penjabat Sekda Ketapang Suherman, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang Alexander Wilyo, Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, dan Kepala Inspektorat Ketapang Devi Frantito.

Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Rahmadi, mengatakan penyerahan LHP dan LKPD tahun anggaran 2020 diberikan pada sembilan entitas pemeriksaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. "Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku," katanya.

Selain itu, lanjutnya, juga memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan ini pihaknya menyampaikan dua buku laporan. Pertama, terdiri laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan. Kedua, laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan kriteria tersebut, laporan keuangan pemda pada sembilan entitas telah disajikan secara wajar dalam segala hal material atau dengan kata lain Wajar Tanpa Pengecualian," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, mengucapkan syukur atas raihan prestasi WTP ketujuh kalinya secara berturut-turut, yang didapat oleh Pemda Ketapang dari BPK Perwakilan Kalbar. "Kita senang dan bersyukur atas raihan ini, yang mana selain Ketapang ada beberapa kabupaten/kota yang mendapat WTP ini," ucapnya.

Alex, sapaan karibnya, menilai bahwa pencapaian WTP sebagai komitmen Pemda Ketapang beserta jajaran OPD terkait kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Menurutnya, apa yang diraih ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksaan fungsi pengawasannya.

"Sejak 5 tahun terakhir kita terus berbenah dengan melakukan perbaikan pelayanan, bahkan proses pelayanan dan administrasi pengelolaan keuangan terus membaik semuanya sudah *by system* dan menerapkan SOP, SPM, terlebih Ketapang juga termasuk dalam daerah binaan Korsupgah KPK RI," terangnya.

Alex berharap agar pencapaian WTP ketujuh kalinya menjadi motivasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mewujudkan misi pertama bupati dan wakil bupati periode 2016 – 2021, yakni mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*). "Tentunya dengan diraihnya WTP ini kami mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, seluruh OPD dan tim penyusun laporan keuangan Ketapang yang telah bekerja keras secara bersama-sama menyelesaikan penyusunan laporan keuangan pemda, serta memperbaiki kinerja pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah di Ketapang," ucapnya.

Alex menambahkan, selain terus meningkatkan kualitas pengeloaan keuangan daerah, Pemda Ketapang berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah bahkan saat ini sesuai sumber website Korsupgah KPK RI Ketapang berhasil mencapai peringkat pertama untuk wilayah Kalbar dan peringkat 75 secara nasional dalam capaian Korsupgah KPK RI untuk intervensi penganggaran APBD.

"Sedangkan untuk pencegahan penyimpangan pada area intervensi manajemen aset daerah sevara nasional Ketapang mendapat peringkat 97 dengan progres capaian 76,45 persen dan meraih peringkat pertama dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar, ini bisa dilihat di *website* Korsupgah KPK RI," pungkasnya. ***(afi)***